

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Konflik Partai Demokrat: Studi Kasus KLB Versi Jhoni Allen Marbun di Deli Serdang Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi Jhoni Allen Marbun terjadi bukan semata-mata karena adanya intervensi aktor eksternal, melainkan merupakan akumulasi dari konflik internal yang dipicu oleh sentralisasi kewenangan dalam AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Tahun 2020 serta munculnya ketidakpuasan sejumlah kader senior terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sentralisasi kewenangan tersebut menyebabkan sebagian kader merasa kehilangan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap posisi strategis di dalam organisasi, sehingga memunculkan faksionalisme yang semakin menguat setelah DPP Partai Demokrat menjatuhkan sanksi pemecatan kepada kader-kader yang dianggap terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partai. Berdasarkan perspektif Maurice Duverger, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi partai yang semakin tersentralisasi berpotensi memunculkan konflik apabila tidak mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok di dalam partai. Sementara itu, teori kekuasaan Harold D. Lasswell menjelaskan bahwa penyelenggaraan KLB Deli Serdang merupakan bentuk perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok Jhoni Allen Marbun sebagai aktor politik (who) untuk memperoleh kembali kepemimpinan Partai Demokrat (gets what) melalui strategi politik di luar mekanisme organisasi (how). Dalam upaya tersebut, keterlibatan Moeldoko dimanfaatkan sebagai sumber daya politik yang diharapkan mampu meningkatkan legitimasi gerakan KLB. Namun, strategi tersebut gagal memperoleh pengakuan negara karena tidak memiliki legitimasi

kelembagaan dan tidak memenuhi ketentuan AD/ART Partai Demokrat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menghadapi penyelenggaraan KLB Deli Serdang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerapkan langkah politik yang mengombinasikan strategi hukum, penguatan organisasi, dan pembentukan opini publik untuk mempertahankan legitimasi kepemimpinannya. Secara kelembagaan, AHY mempertahankan legalitas kepengurusan Partai Demokrat dengan berpegang pada AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 serta menempuh jalur hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM hingga Mahkamah Agung, sehingga kepengurusan hasil KLB tidak memperoleh pengesahan. Selain itu, AHY membangun dukungan publik melalui narasi mengenai upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara inkonstitusional, sehingga memperoleh simpati masyarakat sekaligus memperkuat posisi politik Partai Demokrat di tengah konflik.

Berdasarkan teori kekuasaan Harold D. Lasswell, langkah tersebut menunjukkan kemampuan AHY dalam memanfaatkan berbagai sumber daya kekuasaan untuk mempertahankan kepemimpinan melalui strategi yang tepat (how), baik melalui penguasaan legitimasi hukum maupun pembentukan opini publik. Pada sisi lain, teori partai politik Maurice Duverger menjelaskan bahwa keberhasilan AHY tidak terlepas dari kuatnya struktur organisasi Partai Demokrat yang tetap solid serta memperoleh pengakuan formal dari negara. Oleh karena itu, kegagalan KLB Deli Serdang tidak hanya menunjukkan keberhasilan AHY mempertahankan kepemimpinan partai, tetapi juga membuktikan bahwa legitimasi kelembagaan, konsolidasi organisasi, dan strategi politik yang tepat merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas Partai Demokrat. Keberhasilan tersebut pada akhirnya memperkuat posisi politik AHY sekaligus meningkatkan resiliensi Partai Demokrat dalam menghadapi dinamika politik nasional.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis (Bagi Partai Politik)

Evaluasi AD/ART dan Demokrasi Internal, Partai Demokrat dan partai politik di Indonesia pada umumnya disarankan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan sentralisasi (demi soliditas partai) dengan iklim demokrasi internal. Partisipasi aktif kader daerah dan ruang dialog yang terbuka bagi elite partai perlu dijaga agar kekecewaan tidak terakumulasi menjadi faksionalisme yang merusak institusi. Selain itu, independensi Mahkamah Partai, partai politik perlu menjamin independensi Mahkamah Partai agar terbebas dari subordinasi faksi penguasa. Mahkamah Partai yang adil dan objektif akan mencegah kader yang bersengketa mencari jalan pintas inkonstitusional maupun mencari perlindungan dari aktor politik eksternal.

5.2.2 Saran Akademis (Bagi Peneliti Selanjutnya)

Penelitian ini berfokus pada dinamika elite partai tingkat pusat. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji dampak konflik dualisme kepengurusan ini terhadap soliditas kader dan perolehan suara Partai Demokrat di tingkat daerah (DPD/DPC) pada Pemilu 2024.

Selain itu, fenomena keterlibatan aktor non-partai (eksternal) dalam konflik internal kepartaian dapat dikaji lebih mendalam menggunakan pendekatan teori patron-klien yang berfokus pada relasi kuasa antara birokrasi/militer dengan institusi partai sipil di Indonesia.